
**PERANAN INSTANSI BAPPEDA (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)
UNTUK MENENTUKAN PROGRAM
RPJMD (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH)
INFRASTRUKTUR DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

Melani Regina Lucyana Tarumingkeng¹, George M. V Kawung², Steeva Y. L Tumangkeng³

^{1,2,3}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi. Manado 95115. Indonesia

Email : reginatarumingkeng5@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam menentukan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Provinsi Sulawesi Utara, khususnya dalam sektor infrastruktur. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi integrasi pembangunan wilayah, strategi pembangunan infrastruktur, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPEDA memiliki peran sentral dalam perencanaan, koordinasi, serta evaluasi pembangunan infrastruktur di wilayah Sulawesi Utara. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi, serta kondisi geografis masih menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Infrastruktur, RPJMD, Pembangunan Daerah, BAPPEDA, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) in determining the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) program in North Sulawesi Province, especially in the infrastructure sector. Using a descriptive qualitative research method, this study explores the integration of regional development, infrastructure development strategies, and challenges faced in implementing the RPJMD. The results of the study indicate that BAPPEDA has a central role in planning, coordinating, and evaluating infrastructure development in the North Sulawesi region. However, various challenges such as budget constraints, inter-agency coordination, and geographical conditions are still the main obstacles in implementing the policy.

Keywords: Infrastructure, RPJMD, Regional Development, BAPPEDA, Public Policy

1. PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah merupakan prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2021–2026. Provinsi ini memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang negara Indonesia Timur yang terhubung langsung dengan pasar global, seperti China, Jepang, dan negara-negara Pasifik lainnya. Hal ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai kawasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, termasuk sektor kelapa, perikanan, dan pariwisata bahari. Sebagai badan yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) memiliki peran strategis dalam menyusun, mengoordinasikan, dan mengimplementasikan program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) berupaya untuk mengintegrasikan kebutuhan lokal dengan tujuan pembangunan nasional. Peran ini mencakup pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan program. Oleh karena itu, keberhasilan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam melaksanakan tugasnya sangat menentukan keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonominya. Rostow membedakan proses pembangunan menjadi lima tahap yaitu: masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan dan masa konsumsi tinggi. (Arsyad, 1999 : 117). Beberapa persyaratan pembangunan ekonomi yaitu: Atas dasar kekuatan sendiri, pembangunan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian dalam negeri/daerah. Hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan materil harus muncul dari masyarakatnya. Menghilangkan ketidaksempurnaan pasar.

2.2 Pengertian RPJMD

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. (Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025”).

Mengacu pada UU 25/2004, penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: Strategis, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) harus erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Demokratis dan partisipatif, penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder, dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Politis, bahwa penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD. Perencanaan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Tahapan yang dimaksud dalam PP No. 8 Tahun 2008 ini berawal dari penetapan rencana pembangunan daerah yang terlebih dahulu penentuan rancangan awal yang dilakukan oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Kab./Kota yang terlebih dahulu meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan. Penetapan rencana awal bertujuan untuk menentukan program-program atau pembangunan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Selanjutnya rencana yang sudah ditentukan akan dimusyawarahkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bertujuan untuk menyepakati bersama mana-mana saja program yang akan dilanjutkan atau program prioritas sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan menentukan penyerapan anggaran dari program yang akan dilanjutkan tersebut. Setelah menentukan program prioritas yang akan dilanjutkan yang dibutuhkan pelaksanaannya oleh pemerintah daerah maka ditetapkanlah program tersebut dalam bentuk RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk periode 5 (lima) tahun dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) untuk periode 1 (satu) tahun.

2.3 Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-

tujuan sosial dan ekonomi, (*American Public Works Association*, Stone, 1974 Dalam Kodoatie, R., 2005). Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik, yang bersifat fundamental ditujukan kepada masyarakat ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat, (Hudson, 1997).

2.4 Penelitian Terdahulu

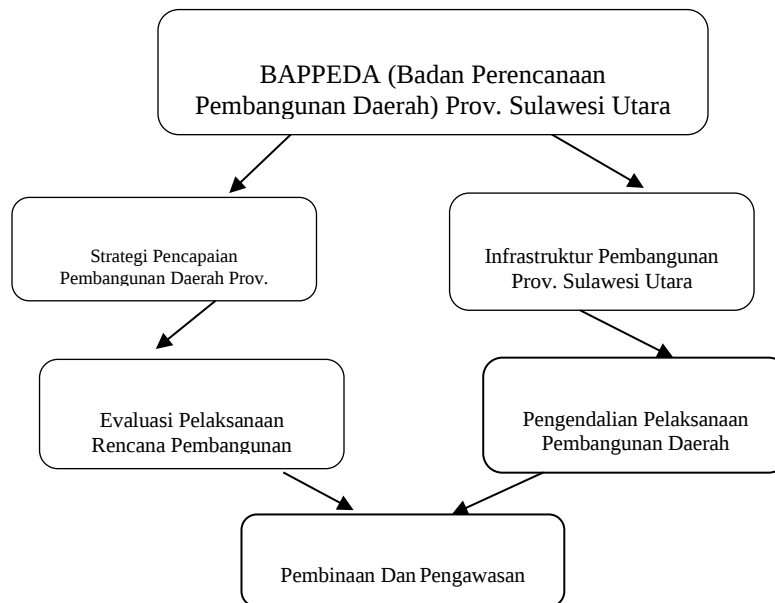
Kumolontang, Engka dan Masloman, penelitian yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2021”. Pembangunan infrastruktur termasuk dalam pembangunan fisik yang keberadaannya memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kebutuhan masyarakat perlu adanya pembangunan merupakan suatu proses menuju perubahan-perubahan yang diupayakan secara terus-menerus dalam meningkatkan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan di desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan angket (kuesioner). Narasumber tersebut yaitu pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa Mapanget Kecamatan, Talawaan Kabupaten, Minahasa Utara. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di desa Mapanget, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, yaitu: Usia dimana usia yang dominan berdasarkan penelitian yaitu usia antara 21-60 tahun sebanyak 35 orang, Jenis Kelamin, dimana jenis kelamin yang dominan berdasarkan penelitian yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 39 orang, pendidikan, dimana pendidikan yang dominan berdasarkan penelitian yaitu pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 28 orang, selanjutnya pekerjaan/penghasilan, dimana faktor pekerjaan/penghasilan yang dominan berdasarkan penelitian yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 22 orang dan lamanya tinggal.

Mewangka, Hannan dan Daud penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan infrastruktur di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa. Adapun jenis data yang dikumpulkan berdasarkan sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Sumber data penelitian ini adalah informan yang dipilih secara purposive sampling. Data penelitian dikumpul melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa teknik analisis interaktif. Hasil analisis memberikan gambaran bahwa secara umum pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Desa Osango belum bisa mengatasi permasalahan yang ada tetapi kegiatan pembangunan tahun anggaran 2019 tetap memberikan dampak positif bagi sebagian masyarakat. Pada tahap perencanaan, pembangunan difokuskan pada pembangunan jalan sebagai prasarana transportasi masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat masih kurang. Sementara pemerintah desa kurang transparan dalam penggunaan dana pembangunan. Pengawasan dan pemantauan sudah dilakukan Pemerintah Daerah, sementara pengawasan yang dilakukan masyarakat masih terbatas, hanya berupa peran serta fisik, belum meluas sampai pada perencanaan maupun evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa adalah: (1.) Faktor pendukung yang meliputi ketersediaan dana, partisipasi masyarakat dan regulasi yang ada dan (2.) Faktor penghambat yang meliputi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat belum maksimal, cuaca dan medan.

2.5 Kerangka Berpikir

Pada gambar berikut digambarkan kerangka konseptual penelitian yang akan diteliti di dalam penelitian ini:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Sumber : Instansi BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami peran BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam perencanaan dan implementasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Pendekatan ini dipilih karena sifat penelitian yang berfokus pada eksplorasi mendalam terhadap strategi, proses, dan tantangan yang dihadapi oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi detail dari berbagai perspektif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi. Salah satu kegiatan pengumpulan data dilakukan bersama pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperoleh data yang relevan dari instansi BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), khususnya di bidang infrastruktur.

- **Wawancara Semi-Terstruktur:** Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi mendalam tentang strategi BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), hambatan yang dihadapi, dan bentuk partisipasi masyarakat.
- **Observasi Partisipatif:** Peneliti hadir dalam beberapa rapat koordinasi dan musyawarah perencanaan pembangunan untuk mengamati dinamika pengambilan keputusan.
- **Analisis Dokumentasi:** Mengkaji dokumen-dokumen resmi, seperti laporan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), hasil survei kepuasan masyarakat, dan laporan pelaksanaan program infrastruktur.

- Dengan implementasi kebijakan dan rekomendasi di atas, diharapkan pembangunan di Sulawesi Utara dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

Selanjutnya data yang sudah diperoleh akan di secara iteratif melalui langkah-langkah berikut:

1. **Reduksi Data:** Memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. **Kategorisasi:** Mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti strategi pembangunan, hambatan, dan dampak program.
3. **Interpretasi:** Menarik kesimpulan berdasarkan pola yang ditemukan dalam data.

Untuk meningkatkan validitas hasil, penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan diskusi dengan rekan untuk memastikan interpretasi data yang konsisten. Keabsahan data dijamin melalui:

- **Triangulasi Teknik:** Membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data.
- **Triangulasi Sumber:** Menggunakan berbagai sumber informasi untuk memperkuat temuan.
- **Audit Trail:** Mendokumentasikan seluruh proses penelitian untuk transparansi dan replikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

Deskripsi Objek Penelitian

BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) berperan dalam mengintegrasikan pembangunan di empat klaster wilayah utama Sulawesi Utara:

1. **Wilayah Kepulauan dan Perbatasan:** Fokus pada infrastruktur dasar dan mitigasi bencana. Wilayah ini menghadapi tantangan geografis seperti isolasi akibat kurangnya akses transportasi. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) mengutamakan pembangunan dermaga kecil dan jalur transportasi darat untuk menghubungkan pulau-pulau terluar dengan pusat ekonomi di Minahasa.
2. **Minahasa Raya:** Mengembangkan industri berbasis kelapa dan pariwisata. Fokus BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) pada wilayah ini adalah peningkatan produktivitas kelapa melalui teknologi pemrosesan dan promosi pariwisata berbasis budaya lokal, seperti festival adat dan pengembangan ekowisata.
3. **Bolaang Mongondow Raya:** Pengembangan komoditas unggulan seperti jagung dan perikanan. BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) berkolaborasi dengan dinas pertanian dan kelautan untuk memastikan program hilirisasi jagung dan pengolahan hasil laut dapat terealisasi.
4. **Manado-Minut-Bitung:** Sebagai kawasan cepat tumbuh, fokus pembangunan adalah konektivitas dan logistik. Proyek strategis seperti pembangunan pelabuhan internasional dan akses jalan tol ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung terus dipercepat.

Pencapaian Program Kerja BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam Infrastruktur

Pendanaan infrastruktur dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2021–2026 didukung oleh berbagai sumber, dengan kontribusi terbesar berasal dari APBD Provinsi sebesar 50%. Alokasi dana ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan proyek infrastruktur.

Tabel 1. Pendanaan Infrastruktur RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2021–2026

Uraian (Rp)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan daerah (Rp)	4.072.305.54 5.344	4.072.073.31 7.072,00	4.094.407.07 5.591,00	4.119.289.55 9.636,00	4.147.876.70 3.057,00	4.177.397.38 8.639,00
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	1.413.292.26 1.344,00	1.433.060.03 3.072,00	1.455.393.79 1.591,00	1.480.276.27 5.636,00	1.508.863.41 9.057,00	1.538.384.10 4.639,00
Pajak Daerah (Rp)	1.123.928.91 1.759,00	1.135.943.85 5.914,00	1.149.962.34 4.088,00	1.166.051.30 4.247,00	1.185.509.00 0.477,00	1.205.551.13 2.829,00
Retribusi Daerah (Rp)	16.850.495.0 00,00	199.100.042. 850,00	206.896.697. 401,00	215.003.375. 713,00	223.432.473. 169,00	232.196.882. 748,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Rp)	50.838.250.0 00,00	50.838.250.0 00,00	50.838.250.0 00,00	50.838.250.0 00,00	50.838.250.0 00,00	50.838.250.0 00,00
Lain-Lain PAD Yang Sah (Rp)	221.674.604. 585,00	47.177.884.3 08,00	47.696.500.1 02,00	48.383.345.6 77,00	49.083.695.4 11,00	49.797.839.0 62,00
PENDAPATAN TRANSFER (Rp.)	2.639.013.28 4.000,00	2.639.013.28 4.000,00	2.639.013.28 4.000,00	2.639.013.28 4.000,00	2.639.013.28 4.000,00	2.639.013.28 4.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Rp)	2.639.013.28 4.000,00	2.639.013.28 4.000,00	2.639.013.28 4.000,00	2.639.013.28 4.000,00	2.639.013.28 4.000,00	2.639.013.28 4.000,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.000.000.000,00	0	0	0	0	0
Pendapatan Hibah	20.000.000.000,00	0	0	0	0	0
Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.087.615.938.923,00	4.087.615.938.923,00	3.607.651.559.723,33	3.757.534.043.768,33	3.867.787.853.856,00	3.917.308.539.438,00
BELANJA	3.061.443.855.553,00	3.061.443.855.553,00	2.766.735.146.619,30	2.933.727.018.560,07	2.861.430.486.781,07	2.908.422.946.334,78
BELANJA OPERASI	1.366.234.187.402,00	1.366.234.187.402,00	1.407.221.213.024,06	1.449.437.849.414,78	1.492.920.984.897,23	1.537.708.614.444,14
Belanja Pegawai	887.200.609.693,00	887.200.609.693,00	536.566.309.349,95	542.279.511.257,02	696.693.335.954,77	706.693.335.954,77
Belanja Barang Dan Jasa	36.106.503.797,00	36.106.503.797,00	68.610.305.514,50	51.669.510.491,91	37.102.235.282,60	28.243.164.358,10
Belanja Bunga	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	4.532.000.000,00	4.667.960.000,00	4.807.998.800,00	4.952.238.764,00
Belanja Subsidi	739.448.552.539,00	739.448.552.539,00	720.909.696.545,13	855.909.696.545,13	599.250.566.269,70	599.250.566.269,70
Belanja Hibah	28.054.002.122,00	28.054.002.122,00	28.895.622.185,66	29.762.490.851,23	30.655.365.576,77	31.575.026.544,07

Belanja Bantuan Sosial	562.085.671.563,00	562.085.671.563,00	299.406.089.981,70	279.299.392.392,27	458.762.505.274,45	458.110.885.448,73
BELANJA MODAL	39.735.594.774,00	39.735.594.774,00	25.375.150.822,68	24.450.185.647,53	43.420.157.270,61	44.722.761.988,73
Belanja Modal Tanah	131.827.300.593,00	131.827.300.593,00	64.184.914.158,69	71.116.238.255,48	97.234.917.667,38	97.234.917.667,38
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	168.307.562.294,00	168.307.562.294,00	97.481.209.280,95	76.404.987.315,92	111.434.677.262,20	109.436.746.042,32
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	220.881.953.901,00	220.881.953.901,00	110.991.557.918,36	105.913.525.638,27	205.215.863.873,15	205.215.863.873,15
Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1.333.260.001,00	1.333.260.001,00	1.373.257.801,03	1.414.455.535,06	1.456.889.201,11	1.500.595.877,15
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	7.000.313.711,00	7.000.313.711,00	7.210.323.122,33	7.426.632.816,00	7.649.431.800,48	7.878.914.754,49
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.313.711,00	7.000.313.711,00	7.210.323.122,33	7.426.632.816,00	7.649.431.800,48	7.878.914.754,49
Belanja Tidak Terduga	457.086.098.096,00	457.086.098.096,00	534.300.000.000,00	537.081.000.000,00	539.945.430.000,00	542.895.792.900,00
BELANJA	367.086.098.096,00	367.086.098.096,00	441.600.000.000,00	441.600.000.000,00	441.600.000.000,00	441.600.000.000,00

TRANSF ER						
Belanja Bagi Hasil	90.000.000.0 00,00	90.000.000.0 00,00	92.700.000.0 00,00	95.481.000.0 00,00	98.345.430.0 00,00	101.295.792. 900,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIA YAAN DAERA H	95.470.393.5 79,00	30.000.000.0 00,00	30.000.000.0 00,00	30.000.000.0 00,00	30.000.000.0 00,00	30.000.000.0 00,00
PENERI MAAN PEMBIA YAAN	80.000.000.0 00,00	30.000.000.0 00,00	30.000.000.0 00,00	30.000.000.0 00,00	30.000.000.0 00,00	30.000.000.0 00,00
Sisa Lebih Perhitung an Anggaran Rahn Sebelumn ya (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahka n	15.470.393.5 79,00	0	0	0	0	0
Penerima an Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
Penerima an Kembali Pemberia n Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0

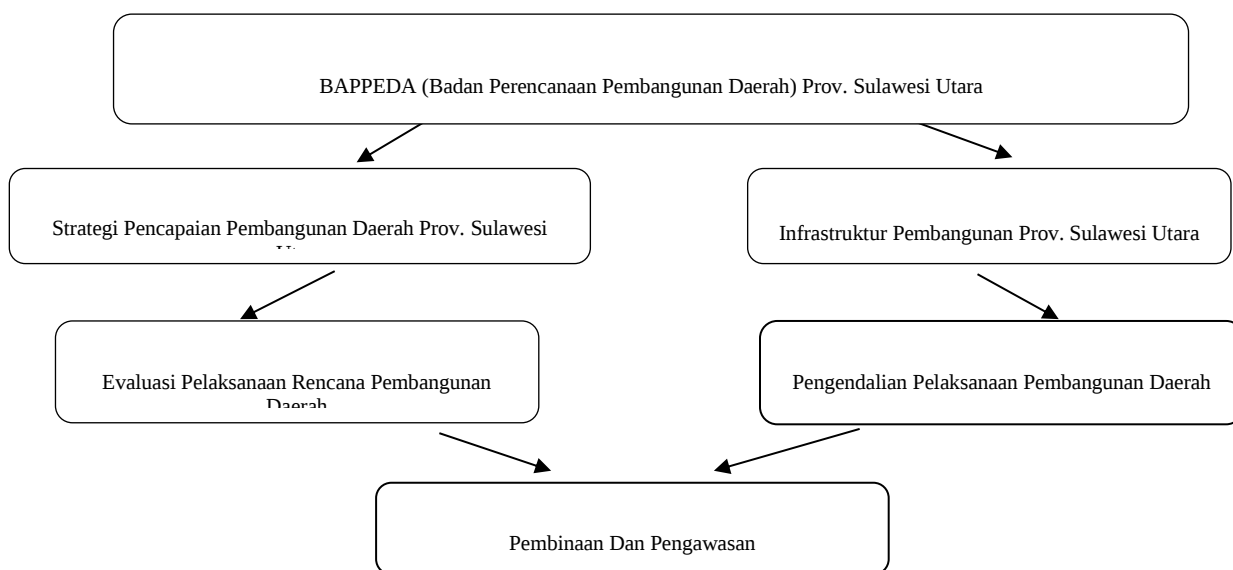
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Dan Peraturan Perundangan	0	0	0	0	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	80.160.000.000,00	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0	9	0
Pembentukan Dana Cadangan	160.000.000,00	150.000.000.000,00	175.000.000.000,00	50.000.000.000,00	75.000.000.000,00	55.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	80.000.000.000,00 1	175.227.648.713,66	341.755.515.867,67	341.755.515.867,67	235.088.849.201,00	235.088.849.201,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	0	0	0	0	0	0
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	0
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan	0	0	0	0	0	0

Peraturan Perundang-undangan						
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.310.393.579,00	295.227.648.713,66	486.755.515.867,67	361.755.515.867,67	280.088.849.201,00	260.088.849.201,00
Pembiayaan Neto	0	310.770.270.564,66	0	0	0	0

Sumber : Instansi BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Peta Konsep

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) memiliki struktur pengambilan keputusan yang kompleks namun terorganisir. Peta konsep keputusan berikut menggambarkan alur pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah):



Sumber : Instansi BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)

Analisis Hasil Pelaksanaan Strategi

Hasil evaluasi menunjukkan:

- **Konektivitas Infrastruktur:** Jalan baru sepanjang 200 km telah selesai dibangun pada akhir tahun ketiga RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Waktu tempuh antarwilayah berkurang rata-rata 30%.
- **Pelayanan Dasar:** Persentase rumah tangga dengan akses air bersih meningkat dari 80% menjadi 88%, meskipun belum mencapai target 95%.

- **Hilirisasi Produk Lokal:** Ekspor kelapa dan produk olahannya meningkat 25% dibandingkan sebelum RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), mendekati target 30%.

Tabel 2. Prioritas Strategi Pembangunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2021–2026

No	Strategi Utama	Target	Indikator Kinerja
1	Konektivitas Infrastruktur	Jalan baru sepanjang 250 km	Penurunan waktu tempuh antar wilayah
2	Pelayanan Dasar	95% cakupan air bersih	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih
3	Hilirisasi Produk Lokal	Peningkatan ekspor kelapa 30%	Volume ekspor kelapa dan produk turunannya
4	Mitigasi Bencana	20 desa program adaptasi iklim	Jumlah desa dengan infrastruktur tanggap bencana
5	Pengembangan Digitalisasi	Digitalisasi layanan publik di 10 kabupaten/kota	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan digital

5. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan program RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sangat bergantung pada peran BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai penggerak utama pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mendukung integrasi perencanaan lintas sektor, penguatan koordinasi antardaerah, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Selain itu, kebijakan perlu diarahkan untuk meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah guna memaksimalkan efektivitas pembangunan infrastruktur. Penekanan pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif juga harus menjadi prioritas utama, termasuk kebijakan yang berorientasi pada adaptasi terhadap perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana..

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. (2021). RPJMD 2021–2026.
- Sukirno, S. (2006). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P. (2004). Economic Development. New York: Addison-Wesley.
- Widodo, T. (2006). Sektor Unggulan dan Pembangunan Wilayah. Jurnal Ekonomi Regional.
- Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.
- World Bank. (2019). Infrastructure for Sustainable Development. Washington, DC: World Bank Publications.
- BPS Sulawesi Utara. (2022). Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2022. Manado: BPS Sulawesi Utara.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Pedoman Penyusunan RPJMD. Jakarta: Kemendagri.
- Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press. *Makro; Analisa IS-LM dan Permintaan-Penawaran Agregatif*. LIBERTY.